

**ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM TERKAIT KONSISTENSI PENGATURAN PENDAFTARAN  
PENDIRIAN CV MENURUT SERANGKAIAN PROSEDUR DALAM SISTEM  
ONLINE SINGLE SUBMISSION TERHADAP KETENTUAN DALAM KUHD  
YANG DITINJAU BERDASARKAN ASAS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**DEAZ WIJAYAKUSUMAH  
1587044**

**ABSTRAK**

Seiring bertambahnya waktu, pengaturan pendaftaran pendirian CV tidak hanya diatur dalam KUHD saja melainkan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Sebelumnya KUHD telah mengatur bahwa pendaftaran CV dilakukan ke Pengadilan Negeri namun dalam Peraturan Menteri melalui Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan pendaftaran CV dilakukan dengan mendaftarkannya ke Sistem Administrasi Badan Usaha secara elektronik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang sifatnya deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang mana data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan pendekatan konseptual. Data tersebut dihimpun dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara kemudian di analisa dengan teknik analisis kualitatif.

Secara normatif isi dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur pendaftaran pendirian CV tidak konsisten terhadap ketentuan yang ada dalam KUHD, oleh sebab itu perlu adanya upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dengan menerapkan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang disertai dengan tindakan nyata berupa pengajuan *legislative review* ataupun *judicial review*. Agar tidak terulang kembali hal yang seperti demikian, hendaknya pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat produk hukum dan para akademisi serta masyarakat turut memperhatikan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah.

**Kata kunci : Konsistensi, Pendaftaran, Persekutuan Komanditer**

**JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY AND LEGAL  
PROTECTION RELATED TO THE CONSISTENCY OF THE REGULATION  
OF CV ESTABLISHMENT REGISTRATION ACCORDING TO A SET OF  
PROCEDURES IN THE ONLINE SINGLE SUBMISSION SYSTEM ON  
PROVISION OF KUHD THAT REVIEWED BASED ON THE PRINCIPLE  
OF LEGISLATION**

**DEAZ WIJAYAKUSUMAH  
1587044**

**ABSTRACT**

As the time goes by, the regulation of the CV establishment registration not only arranged in KUHD but also in Government Regulation Number 24 of 2018 about Electronically Integrated Business License Service linked up to Law and Human Rights Minister Regulation Number 17 of 2018 about The Limited Partnership, The Firm Partnership, and The Civil Partnership Registration. Formerly KUHD have governed that CV registration was done to the District Court, but in Minister Regulation through Government Regulation said that CV registration was done by enrolled it electronically to the Business Entity Administration System.

The methodology used in this research is normative juridical which are descriptive. The data used in this research is primary and secondary data, which secondary data consists of the primary, secondary, and tertiary law materials. This research using acts and conceptual approach. The data collected by study literature and interview technique then analyzed by qualitative analysis technique.

Normatively the content of Government Regulation and Minister Regulation that govern the CV establishment registration inconsistent to the existing regulation in KUHD, therefore it's need legal remedy as a form for legal protection and legal certainly for concerned parties by applying *lex superior derogate legi inferiori* principle accompanied by a real action in the form of legislative review or judicial review submission. In order to not happened again, the government should be more careful in making legal products and academics as well the people need to pay attention to the legal product that produced by the government.

**Keyword : Consistency, Registration, Limited Partnership**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9

C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Kegunaan Teoritis .....	10
2. Kegunaan Praktis .....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	15
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Pendekatan Penelitian .....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II TINJAUAN MENGENAI PENDAFTARAN CV MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG .....23**

A. Tinjauan Umum Persekutuan Komanditer ( <i>Commanditaire Venootschap</i> ) .....	23
--	----

1. Pengertian Umum Persekutuan Komanditer .....	23
2. Pihak-pihak/Sekutu-sekutu di dalam Persekutuan Komanditer ....	24
3. Bentuk-bentuk Persekutuan Komanditer .....	25
4. Syarat-syarat dan Pendirian Persekutuan Komanditer .....	27
5. Kelebihan dan Kekurangan CV.....	29
<b>B. Aspek Hukum Pendirian dan Pendaftaran Persekutuan Komanditer</b>	
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) .....	32
1. Aspek Hukum CV Secara Keseluruhan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang .....	32
2. Pendirian dan Pendaftaran Persekutuan Komanditer Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.....	34
3. Berakhirnya Persekutuan Komanditer Berdasarkan KUHD .....	42
<b>C. Pendaftaran CV Berdasarkan Sudut Pandang Notaris Saat Ini .....</b>	<b>44</b>
<b>D. Teori Perlindungan Hukum.....</b>	<b>46</b>
<b>E. Teori Kepastian Hukum.....</b>	<b>47</b>

**BAB III TINJAUAN MENGENAI PENDAFTARAN CV MENURUT  
KETENTUAN YANG TERKANDUNG DALAM REGULASI *ONLINE SINGLE  
SUBMISSION* .....48**

**A. Sejarah Prosedur Pendirian dan Pendaftaran CV Dari Sebelum**

Hingga Sesudah Diberlakukannya <i>Online Single Submission</i> .....	48
B. Tinjauan Umum Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) .....	53
1. Alasan Dibuatnya Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pandangannya Terhadap CV.....	53
2. Pengertian Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eelektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) .....	57
3. Pihak-pihak yang Tunduk Kepada Keberlakuan <i>Online Single         Submission</i> .....	58
4. Manfaat dari Mekanisme OSS .....	61
C. Pendirian dan Pendaftaran CV Berdasarkan Peraturan <i>Online Single         Submission</i> .....	62
D. Asas-asas Pembentukan dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	69
1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	69
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	74

**BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI KONSISTENSI, KEPASTIAN HUKUM,  
SERTA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN PENDIRIAN  
CV YANG DI TINJAU BERDASARKAN ASAS DAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU .....80**

A. Konsistensi Penerapan Sistem OSS Dalam Pendaftaran CV Ditinjau

Dari Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	80
B. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Pendaftar Atau Pemilik CV Terkait Penerapan OSS Dalam Pendaftaran CV Dikaitkan Dengan Pendaftaran CV Di Pengadilan Negeri Setempat .....	99
1. Perlindungan Hukum Bagi Pendaftar atau Pemilik CV Terkait Penerapan OSS Dalam Pendaftaran CV Dikaitkan Dengan Pendaftaran CV Di Pengadilan Negeri Setempat .....	99
2. Kepastian Hukum Bagi Pendaftar Atau Pemilik CV Terkait Penerapan OSS Dalam Pendaftaran CV Dikaitkan Dengan Pendaftaran CV Di Pengadilan Negeri Setempat.....	112
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>128</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kota Bandung





## DAFTAR GAMBAR

### 3.1 Pengajuan Permohonan Pendaftaran Pendirian CV Menurut Sistem OSS



## DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Perbedaan Ketentuan Pendaftaran Pendirian CV Antara KUHD dengan PP  
OSS dan Permen Pendaftaran Badan Usaha

